

Globethics Repository

The logo for Globethics, featuring the word "Globethics" in white sans-serif font on a blue rectangular background.

Pemuda, Pendidikan, dan Peran Aktivis Kepemudaan di Perbatasan Pulau Sebatik, Provinsi Kalimantan Utara

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository.
More information on Globethics see <https://www.globethics.net>. Data and content policy
of Globethics Repository see <https://repository.globethics.net/pages/policy>.

Item Type	Article
Authors	Fuadi, Choirul
Publisher	Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Rights	With permission of the license/copyright holder
Download date	2026-09-24 16:09:17
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/161371

Pemuda, Pendidikan, dan Peran Aktivis Kepemudaan Diperbatasan Pulau Sebatik,
Provinsi Kalimantan Utara

Choirul Fuadi,

Pascasarjana Univeritas Negeri Yogyakarta Prodi Linguistik Terapan

Choirulfuadi78@gmail.com/085787662844

Naufal Fitryansyah

Pascasarjana Univeritas Negeri Yogyakarta Prodi Management Pendidikan

Fy.naufal@gmail.com/085346999269

Abstrak: Perbatasan merupakan garda terdepan dari NKRI, sehingga perlu perhatian yang serius dari pemerintah. Perhatian tersebut dapat terimplementasi dalam berbagai hal, seperti pendidikan, sarana dan prasarana, serta kebudayaan yang ada. Dewasa ini, Pulau Sebatik, sebagai salah satu pulau terluar dan pulau terdepan yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia, mengalami berbagai masalah sosial baik dalam pemuda, pendidikan dan multi budaya. Salah satu masalah yang dihadapi pemuda adalah bahaya narkoba dan degradasi moral. Dari segi pendidikan yakni kurangnya fasilitas pendidikan. Dari segi budaya, masyarakat Sebatik telah sangat mengenal istilah “garuda didadaku, ringgit didompetku” yakni bertransaksi menggunakan uang ringgit Malaysia namun berkebangsaan Indonesia, serta berhadapan langsung dengan budaya melayu malaysia. Artikel ini bertujuan untuk; 1) mendeskripsikan dan mengangkat permasalahan - permasalahan diperbatasan Pulau Sebatik dalam cakupan pemuda, pendidikan dan memberi solusi mengenai permasalahan-permasalahan tersebut, 2) Peran aktivis kepemudaan dalam hal pemuda, dan pendidikan. Artikel ini bersifat kualitatif deskriptif. Dalam pembahasa ditemukan berbagai permasalahan dipulau sebatik. Permasalahan yang ada di perbatasan Pulau Sebatik tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Namun, perlu kerjasama antara masyarakat dan pemerintah baik pejabat daerah dan pusat.

Kata kunci : Pendidikan, Pemuda, Pulau Sebatik, Aktivis kepemudaan.

PENDAHULUAN

Pulau Sebatik adalah pulau terdepan dan pulau terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pulau ini terdapat di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara yang merupakan kabupaten tertinggal berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan daerah Tertinggal Tahun 2015-2019. Luas wilayah Pulau Sebatik $\pm 247,47 \text{ KM}^2$ dengan jumlah penduduk 47.709 jiwa berdasarkan database SIAK periode Juni 2016 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Terluar, Pulau Sebatik dinobatkan menjadi pulau terluar bersama 91 pulau lainnya. Berdasarkan peraturan ini, titik koordinat pulau terluar ini adalah $04^{\circ}08'35'' \text{ LU}$, $117^{\circ}47'14'' \text{ BT}$. Sedangkan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Pulau Sebatik ditetapkan sebagai daerah terdepan NKRI. Wilayah Pulau Sebatik terbagi menjadi 2 bagian, yakni bagian Utara milik Kerajaan Malaysia, sedangkan pada bagian selatan milik Republik Indonesia. Pada bagian utara wilayah Sebatik berbatasan dengan Negara Bagian Sabah (Malaysia), bagian timur berbatasan dengan laut Sulawesi, sedangkan pada bagian selatan dan barat berbatasan dengan Selat Sebatik.

Kecamatan Sebatik resmi terbentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1996 dimana pada saat itu terdiri dari Desa Setabu, Desa Pancang, Desa Sungai Nyamuk, dan Desa Tanjung Karang. Semakin pesatnya jumlah pertumbuhan penduduk Pulau Sebatik dan rencana pemerintah menjadikan pulau ini sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB), maka pemerintah melakukan pemekaran desa dan kecamatan, sehingga wilayah Kecamatan Sebatik terbagi menjadi 19 Desa dan 5 Kecamatan, yakni Kecamatan Sebatik, Kecamatan Sebatik Barat, Kecamatan Sebatik Timur, Kecamatan Sebatik Utara, dan Kecamatan Sebatik Tengah.

Kecamatan Sebatik terdiri dari 4 Desa yaitu Desa Padaidi, Desa Sungai Manurung, Desa Tanjung Karang, dan Desa Balansiku. Ibu kota dari Kecamatan Sebatik adalah Desa Tanjung Karang. Kecamatan Sebatik Barat resmi terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor Kabupaten Nunukan Nomor 03 Tahun

2006. Wilayah Kecamatan Sebatik Barat terdiri dari 4 Desa yaitu Desa Setabu, Desa Binalawan, Desa Liang Bunyu, dan Desa Bambang. Ibu kota dari Kecamatan Sebatik Barat adalah Desa Binalawan.

Kecamatan Sebatik Timur, Kecamatan Sebatik Utara, dan Kecamatan Sebatik Tengah resmi terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor Kabupaten Nunukan Nomor 25 Tahun 2011. Kecamatan Sebatik Timur terdiri dari 4 Desa yaitu Desa Sungai Nyamuk, Desa Tanjung Harapan, Desa Tanjung Aru, dan Desa Bukit Aru Indah. Ibukota dari Kecamatan Sebatik Timur adalah Desa Sungai Nyamuk. Kecamatan Sebatik Utara terdiri dari 3 Desa yaitu Desa Seberang, Desa Lapri, dan Desa Pancang. Ibu kota dari Kecamatan Sebatik Utara adalah Desa Pancang. Wilayah Kecamatan Sebatik Tengah terdiri dari 4 Desa yaitu Desa Sungai Limau, Desa Maspul, Desa Aji Kuning, dan Desa Bukit Harapan. Ibu kota Kecamatan Sebatik Tengah adalah Desa Aji Kuning.

Pulau Sebatik akrab dengan sapaan “1 Pulau 2 Tuan” atau “Pulau Double Country” atau “Pulau Tapal Batas”. Sapaan tersebut sangat mendasar dikarenakan wilayah Pulau Sebatik yang terbagi menjadi 2 bagian, yakni bagian utara milik Kerajaan Malaysia, sedangkan bagian selatan milik Republik Indonesia. Pembagian wilayah ini berdasarkan pada hasil wilayah jajahan, dimana wilayah Sebatik Malaysia merupakan hasil jajahan Inggris sedangkan Sebatik Indonesia adalah wilayah hasil jajahan Belanda. Wilayah Pulau Sebatik meliputi perbatasan daratan, lautan, dan udara dengan negara Malaysia. Di Pulau Sebatik terdapat 18 patok perbatasan wilayah antara Indonesia dengan Malaysia.

Menurut Bengen (Abubakar, 2006 : 19) permasalahan yang terjadi di pulau-pulau kecil perbatasan adalah kondisinya yang relatif terisolasi dan jauh dari pulau induknya, terbatasnya sarana dan prasarana perekonomian seperti, jalan, pelabuhan, pasar, listrik, lembaga keuangan yang menyebabkan tingkat kesejahteraan dan pendapatan masyarakatnya rendah serta rendahnya kualitas sumber daya manusia akibat kurangnya fasilitas pendidikan, tidak tersedianya media informasi dan komunikasi serta fasilitas kesehatan.

Sebagai daerah perbatasan, Pulau Sebatik dihadapkan dengan berbagai masalah pendidikan dan kepemudaan. Masalah pendidikan seperti minimnya sarana pendidikan, kurangnya tingkat kesejahteraan guru, dan sulitnya

mendapatkan ases pendidikan. Sedangkan masalah kepemudaan adalah maraknya peredaran narkoba yang jelas mengancam dan merusak generasi bangsa diperbatasan Pulau Sebatik.

Menurut Ki Hajar Dewantara (2011 : 20), pendidikan adalah tuntunan didalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksud dari pendidikan ini menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.

Menurut UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan di Indonesia menurut UU Nomor 20 Tahun 2003 terbagi menjadi tiga, yaitu pendidikan formal, pendidikan non-formal dan pendidikan informal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

Berbagai permasalahan pendidikan sedang terjadi Indonesia seperti permasalahan yang paling mencolok adalah pemerataan pendidikan. Permasalahan ini sudah sangat lama terjadi, sehingga terjadi ketimpangan antara pendidikan di Pulau Jawa dengan pendidikan di Pulau Kalimantan. Ketimpangan ini terjadi disebabkan pendistribusian guru yang tak merata, kurangnya sarana pendidikan, dan tingkat kesejahteraan guru yang masih rendah. Kemudian menurut UU Nomor 20 Tahun 2003, Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.

Dari permasalahan yang ada, harus dianalisa terlebih dahulu dan kemudian diberikan solusi dari masalah tersebut. Artikel ini bertujuan untuk 1) mendeskripsikan dan mengangkat permasalahan - permasalahan diperbatasan

Pulau Sebatik dalam cakupan pemuda, pendidikan dan serta memberi solusi mengenai permasalahan-permasalahan tersebut, 2) Peran aktivis kepemudaan dalam hal pemuda dan pendidikan.

PEMBAHASAN

1. Permasalahan di Pulau Sebatik

a. Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan investasi pembangunan sumber daya manusia yang sangat diperlukan dalam pembangunan sosial dan ekonomi suatu masyarakat dan suatu bangsa. Kekuasaan negara yang begitu besar mencakup segenap kehidupan masyarakat di perbatasan Pulau Sebatik, maka tidak bisa dipungkiri bahwa negara juga mengatur kehidupan pendidikan. Negara juga berkepentingan terhadap lembaga pendidikan untuk digunakan sebagai agen dalam membangun watak dan kesadaran jiwa nasionalisme masyarakat perbatasan Pulau Sebatik. Pendidikan dewasa ini diselenggarakan semakin demokratis, semakin merata dan terbuka bagi setiap orang.

Pulau Sebatik biasa juga disebut sebagai “Kota Pendidikan Anak TKI”. Susahnya mendapatkan akses pendidikan di Malaysia membuat para TKI (Tenaga Kerja Indonesia) memilih perbatasan Pulau Sebatik sebagai jalur untuk mendapatkan akses pendidikan bagi anak mereka. Konstitusi negara ini telah mengatur dalam Undang-undang Pasal 31 ayat (1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, ayat (2) mengatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Di dalam undang-undang ini sudah cukup jelas diatur, bahwa setiap warga manusia memiliki hak atas pendidikan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Namun masyarakat perbatasan Pulau Sebatik dan anak TKI dalam mengakses pendidikan masih memprihatikan karena kurangnya perhatian pemerintah.

Presiden Joko Widodo dalam program *nawacita* akan membangun dari daerah terdepan dan daerah pinggiran. *Tag line* kebijakan ini akan bias ketika kurang maksimalnya implementasi kebijakan yang salah

satunya dikhususkan untuk perbatasan Pulau Sebatik di Provinsi Kalimantan Utara. Untuk mengatasi berbagai persoalan yang ada di daerah perbatasan Pulau Sebatik khususnya permasalahan sektor pendidikan, maka diperlukan campur tangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dengan adanya campur tangan pemerintah pusat di daerah perbatasan ini adalah salah satu bentuk kerja nyata pemerintah pusat untuk mempertahankan wilayah Pulau Sebatik.

Kerja nyata yang dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah khususnya sektor pendidikan belum dirasakan secara signifikan warga perbatasan Pulau Sebatik. Kerja nyata pemerintah terhambat disebabkan kurang maksimalnya implementasi kebijakan pendidikan di perbatasan Pulau Sebatik, yakni kurangnya sosialisasi program pendidikan, kebijakan yang selalu berganti, banyaknya instansi yang mengatur daerah perbatasan, pengurusan birokrasi yang terlalu panjang dan berbelit-belit.

Fasilitas pendidikan di perbatasan Pulau Sebatik masih dikatakan tertinggal. Data dari BPS kabupaten Nunukan 2015 menyebutkan bahwa di Kecamatan Sebatik Barat, belum terdapat sekolah SMA sehingga siswa yang telah menyelesaikan pendidikan di SMP mayoritas melanjutkan pendidikan di Kecamatan Sebatik dengan jarak tempuh yang jauh. Cara lainnya yakni siswa memilih melanjutkan ke ibukota kabupaten dengan cara melintas laut ke Pulau Nunukan. Sedangkan siswa yang tidak melanjutkan sekolah memilih untuk menjadi TKI negara tetangga Malaysia, beberapa faktor penyebab siswa tidak melanjutkan sekolah karena faktor kemiskinan, tidak adanya sekolah SMA, kurangnya dorongan orang tua, dan mahal biaya pendidikan.

Selain itu, kurangnya memadai sarana perpustakaan di sekolah, seperti jumlah buku dan masih ada sekolah yang belum ada perpustakaannya. Padahal tujuan dari adanya perpustakaan adalah menumbuhkan budaya dan minat membaca. Oleh karena itu, diperlukan adanya penambahan sarana perpustakaan yang memadai.

Salah satu program yang dicanamkan Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah mendirikan Akademi Komunitas di perbatasan Pulau Sebatik. Program ini adalah salah bentuk untuk meningkatkan kompetensi lulusan SMK anak perbatasan dan anak TKI agar mampu bersaing di dunia kerja, namun program ini tidak terealisasi dikarenakan adanya pergantian pengambilan kebijakan di republik ini.

Salah satu program unggulan dari Presiden Joko Widodo, yakni Kartu Indonesia Pintar (KIP) belum dirasakan warga perbatasan Pulau Sebatik dan anak TKI, bahkan warga perbatasan tidak pernah mendengar program ini. Selain itu, Presiden Joko Widodo dibawah Kementerian Perikanan dan Kelautan mempunyai program membangun 5 perguruan tinggi di wilayah terluar dan terdepan NKRI salah satunya di perbatasan Pulau Sebatik. Perguruan tinggi yang akan dibangun di Pulau Sebatik akan diberi nama Politeknik Perikanan Negeri Sebatik, namun program ini belum ada tanda-tanda untuk direalisasikan.

b. Pemuda dan Peran Aktivis Kepemudaan

Menurut Nurcahyani (2008 : 3) mengatakan bahwa pada umumnya wilayah perbatasan selalu menjadi basis kegiatan perdagangan antar negara baik secara legal maupun illegal. Secara sadar atau tidak, daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga sangat rentan terkontaminasi dalam berbagai aspek kehidupan, terutama aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Telah disebutkan bahwa pulau sebatik terdiri atas berbagai macam ras suku bangsa. Dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, warga Pulau Sebatik masih mengandalkan pasokan dari Kota Tawau yang berada di Malaysia.

Dalam hal ini, mereka menyebut istilah Garuda didadaku, Ringgit didompetku. Ringgit adalah nama mata uang negara Malaysia, mata uang ini sangat populer di kalangan dan digunakan sebagai transaksi jual beli warga perbatasan Pulau Sebatik. Bahkan Kehidupan warga perbatasan ini sangat bergantung dengan Kota Tawau (Sabah, Malaysia), karena hampir semua kebutuhan pokok warga perbatasan disuplai dari Kota Tawau

Malaysia. Ketergantungan hidup warga perbatasan Pulau Sebatik tak dapat lagi dihindari. Hasil bumi warga perbatasan Pulau Sebatik hampir semuanya di jual ke Kota Tawau Malaysia seperti hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil perikanan, hasil laut, dan sebagainya. Ironinya, warga Malaysia membeli hasil bumi ini dengan harga yang sangat murah.

Kuatnya ketergantungan ekonomi warga perbatasan Pulau Sebatik terhadap Kota Tawau Malaysia menyebabkan semakin kuatnya dominasi ringgit terhadap rupiah. Miliaran rupiah uang warga perbatasan Pulau Sebatik beredar di Kota Tawau Malaysia, minimnya infrastruktur dalam menjalankan roda perekonomian dan kurangnya perhatian pemerintah adalah faktor utama warga perbatasan ini lebih memilih membelajakan uangnya ke luar negeri. Sebagai bahan perbandingan, Kerajaan Malaysia sudah sejak lama mendesain Kota Tawau sebagai magnet ekonomi untuk warga perbatasan Pulau Sebatik. Kerajaan Malaysia memberikan status otonomi kepada Kota Tawau, sehingga tidak heran jika Kota Tawau Malaysia memiliki fasilitas penunjang ekonomi seperti bandara, pelabuhan, jalan raya, pasar, dan listrik yang tidak pernah mati.

Selain itu, bayangan lain yang dihadapi pemuda di Pulau sebatik adalah Bahaya Narkoba. Narkoba menjadi permasalahan utama di perbatasan Pulau Sebatik. Pasca Malaysia melakukan penutupan pelabuhan jalur Sebatik – Tawau Malaysia pada tanggal 1 Januari 2013, Pulau Sebatik menjadi gerbang utama masuknya narkoba dari luar negeri untuk diedarkan kesejumlah wilayah di Indonesia seperti di Kalimantan, Sulawesi, dan Jawa dengan menggunakan pelabuhan tikus. Saat ini, banyak generasi Sebatik baik dari pemuda maupun siswa yang menjadi target pengedar, pengguna narkoba dan bahkan sudah ada yang masuk penjara. Pulau Sebatik juga digunakan teroris sebagai jalur memasukan bahan baku untuk membuat senjata dan bom di Indonesia.

Melihat permasalahan tersebut, beberapa organisasi kepemudaan diperbatasan Pulau Sebatik seperti KNPI Sebatik Barat, Forum Mahasiswa Sebatik (FORMAS), Himpunan Mahasiswa Sebatik (HIPMAS), Forum Bela Negara (FBN) Sebatik membuat program kerja. Program kerja kerja

didesain dengan melibatkan pelajar dan masyarakat seperti KNPI Sebatik Barat mengadakan jelajah tapal batas, kegiatan jelajah tapal batas ini bertujuan untuk memperjelas dan mengajak pelajar dan masyarakat untuk mengenal patok perbatasan yang memisahkan antara Indonesia dan Malaysia. Selain itu, pada tanggal 28 Nopember 2016 KNPI Sebatik barat juga mengadakan sumpah di patok 15 bersama pemuda, pelajar, dan masyarakat pulau sebatik.

Forum Mahasiswa Sebatik (FORMAS) dan Himpunan Mahasiswa Sebatik (HIPMAS) adalah organisasi kemahasiswaan yang fokus pada pendidikan dengan cara mengajak generasi Sebatik untuk melanjutkan pendidikan diperguruan tinggi dan aktif mengadvokasi pelajar Sebatik. Beberapa bentuk program kerja seperti mengadakan seminar motivasi, kompotisi karya ilmiah, kajian Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Sebatik, dan sosialisasi kampus. Forum kemahasiswaan ini juga aktif memperkenalkan Pulau Sebatik kepada lembaga lain, mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang tak pro rakyat.

Pemuda Sebatik yang bergabung dengan Forum Bela Negara (FBN) Sebatik aktif dimasyarakat dengan mengadakan kegiatan seperti tanam pohon dipatok perbatasan Indonesia-Malaysia, mengadakan pengkajian batas wilayah perbatasan, dan bazar cinta rupiah. Sedangkan pemuda Sebatik yang bergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), seperti LSM Ganas yang berkomitmen mengawal pemerintahan dan aktif mengkritisi kebijakan pemerintah daerah yang tak pro rakyat. LSM Ganas telah mengkritisi kebijakan pemerintahan tak mengganti anggota DPRD dapil Sebatik yang tersangkut kasus korupsi.

2. Solusi

Pembangunan wilayah perbatasan merupakan bagian integral bagi bangsa Indonesia, sehingga membutuhkan strategis untuk mempertahankan kedaulatan negara Indonesia seperti mendorong pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Sebatik, mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan.

a) Pendidikan

- Pemerataan pendidikan.
- Membuat kota pendidikan. Banyak anak TKI yang menuntut ilmu diperbatasan Pulau Sebatik menjadi potensi untuk meningkatkan Sumber daya manusia Indonesia. Dengan ditetapkan Pulau Sebatik sebagai kota pendidikan maka akan membuat sentral pendidikan baru di Indonesia timur sehingga akses pendidikan untuk anak TKI lebih mudah dijangkau, apalagi saat ini sulitnya mendapatkan akses pendidikan di negara Malaysia.
- Peningkatan Fasilitas pendidikan
- Pemberian beasiswa
- Mendirikan perguruan tinggi
- Peningkatan kesejahteraan Guru
- Peningkatan Kualitas kompetensi guru melalui pendidikan dan pelatihan.
- Pengadaan sarana perpustakaan.

b) Kepemudaan dan Aktivis Kepemudaan

- Peran pemerintah dalam pengelolaan pemuda dan lembaga kepemudaan.
- Dukungan baik moril dan materil dari Pemerintah pusat dan daerah.
- Penguatan organisasi kepemudaan sebagai basis perkumpulan remaja.
- Membuat studi banding keluar untuk kepemudaan dan aktivis kepemudaan.

KESIMPULAN

Permasalahan yang ada di perbatasan Pulau Sebatik tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Namun, perlu kerjasama antara masyarakat dan pemerintah baik pejabat daerah dan pusat.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan. Diakses pada 29 Oktober 2016 dari <https://nunukankab.bps.go.id>
- Dewantara, Ki Hajar. 2011. Pendidikan. Yogyakarta: Yayasan UST
- Mustafa, A. 2006. Menata Pulau-pulau Kecil Perbatasan : Belajar dari Kasus Sipadan, Ligitan, dan Sebatik. Jakarta : Buku Kompas
- Nurchayani, L. Ade, S., Ini C. Sasi. 2008. Identitas Suku Di Perbatasan (Tinjauan Sejarah dan Sosial Budaya) Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan Kalimantan Timur). Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Pontianak : Pontianak
- Peraturan Daerah Nomor Kabupaten Nunukan Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kecamatan Sebatik Barat
- Peraturan Daerah Nomor Kabupaten Nunukan Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Kecamatan Sebatik Timur, Kecamatan Sebatik Utara, dan Kecamatan Sebatik Tengah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1996 Tentang Pembentukan Kecamatan Sebatik
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Terluar
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara